

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN

2.1 Tentang Pemerintahan Daerah Inspektorat Balikpapan

Inspektorat Kota Balikpapan merupakan salah satu perangkat daerah yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Balikpapan, lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas pengelolaan berbagai aspek pemerintahan di wilayah Kota Balikpapan. Sebagai kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus pusat industri, jasa, dan energi di Kalimantan Timur, Balikpapan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah dan nasional. Pemerintahan Kota Balikpapan dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dibantu oleh berbagai perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dalam struktur ini, Inspektorat memegang posisi penting sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berperan dalam memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan bertanggung jawab melalui fungsi pengawasan yang efektif



*Gambar 2. 1 Logo Inspektorat Kota Balikpapan
Sumber : Dokumen Pemerintahan*

Secara umum, Inspektorat Kota Balikpapan memiliki tugas utama sebagai

aparatus pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab dalam memantau pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek penting, baik administratif, keuangan, maupun kinerja. Dalam menjalankan tugas tersebut, inspektorat berfungsi untuk memastikan bahwa setiap program, kebijakan, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta efisien dalam penggunaan anggaran negara.

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh inspektorat meliputi sejumlah kegiatan utama. Pertama, melakukan audit internal terhadap OPD guna mengukur sejauh mana pelaksanaan program kerja sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan. Audit ini tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga mencakup audit kinerja dan audit kepatuhan. Kedua, inspektorat juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Evaluasi ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan. Ketiga, inspektorat menelaah dokumen perencanaan dan penganggaran dari OPD untuk memastikan bahwa dokumen tersebut disusun secara rasional, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keempat, lembaga ini juga memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik dari hasil audit internal maupun temuan lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, inspektorat Kota Balikpapan juga berperan aktif dalam menangani pengaduan masyarakat. Pengaduan ini umumnya terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara, penyimpangan penggunaan anggaran, gratifikasi, serta penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Dalam konteks ini, inspektorat menjadi fase awal dalam proses klarifikasi dan verifikasi terhadap laporan masyarakat, sebelum dilimpahkan ke instansi penegak hukum apabila ditemukan indikasi kuat atas pelanggaran yang terjadi. Peran ini menjadikan inspektorat sebagai garda

terdepan dalam menjaga integritas pemerintahan daerah

Selain fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan, inspektorat juga menjalankan peran pembinaan terhadap aparatur sipil negara (ASN). Pembinaan ini mencakup penanaman nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan etika kerja dikalangan ASN, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan dan kode etik pemerintahan. Salah satu fokus penting adalah membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, serta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, inspektorat tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina moral birokrasi daerah.

Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, Inspektorat Kota Balikpapan menjadi salah satu elemen kunci dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

2.2 Visi Misi Inspektorat Balikpapan

VISI

Mewujudkan Balikpapan sebagai kota 5 dimensi : jasa, industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan budaya dalam bingkai Madinatul Iman.

MISI

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing,
2. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai,
3. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan,
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif,
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata ke pemerintahan yang baik.

2.3 Struktur Organisasi Inspektorat Balikpapan

Inspektorat Kota Balikpapan memiliki struktur organisasi yang tersusun sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Inspektorat

Sumber: Dokumen Pemerintahan (2025)

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Balikpapan terdiri berbagai macam unsur utama yaitu inspektur, Inspektur Pembantu (IRBAN), sekretariat, serta beberapa jabatan fungsional auditor. Berikut penjabaran peran dari masing-masing yang ada di dalam struktur organisasi Inspektorat Kota Balikpapan :

- **Inspektur** : Menjalankan tugas sebagai pimpinan tertinggi di Inspektorat Kota Balikpapan, beliau bertugas memimpin seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan, evaluasi, audit, dan pemantauan atas kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah. Perannya mencakup pengambilan kebijakan strategis pengawasan, memastikan tercapainya *good governance* melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- **Sekretaris** : Bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi dan tata kelola organisasi Inspektorat. Perannya mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, pengarsipan dokumen, hingga sarana dan prasarana. Sekretaris juga berfungsi sebagai penghubung antara unit pelaksana teknis (IRBAN) dengan pimpinan serta pihak eksternal yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan

- **Irbán I** : Bertugas melaksanakan fungsi pengawasan dan audit di wilayah kerja Irbán I. Ia bertanggung jawab atas audit kinerja, audit keuangan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap OPD-OPD yang menjadi cakupan Irbán I. Bapak Mahendra bersama tim auditor bertugas memastikan bahwa pelaksanaan program dan anggaran pada OPD terkait berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- **Irbán II** : Memiliki tugas pengawasan internal terhadap OPD yang masuk dalam lingkup Irbán II. Tugasnya meliputi pelaksanaan audit operasional, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan program kerja perangkat daerah. Beliau juga berperan sebagai pengendali mutu kegiatan pengawasan agar hasil pengawasan dapat digunakan sebagai dasar pembinaan dan perbaikan kinerja perangkat daerah.
- **Irbán III** : Sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III, beliau melaksanakan kegiatan audit tematik maupun reguler pada OPD tertentu, termasuk penilaian kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan kebijakan anggaran. Ibu Fitriana juga bertanggung jawab dalam menyusun rekomendasi hasil audit untuk ditindaklanjuti oleh OPD yang bersangkutan.
- **Irbán IV** : Memimpin pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan OPD wilayah IV. Fokusnya dapat mencakup audit efektivitas program strategis daerah serta *monitoring* atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dari lembaga pengawas eksternal. Irbán IV juga dapat dilibatkan dalam pengawasan berbasis risiko tertentu sesuai prioritas pembangunan daerah.
- **Perencana Muda I** : Bertugas membantu perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat. Ibu Evi mendukung penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP). Ia juga berperan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk merancang kebijakan pengawasan dan pengembangan kelembagaan.
- **Kasubag Umum** : Memimpin sub bagian umum yang berperan dalam

bagian kehumasan, penyediaan layanan administrasi, perlengkapan, kepegawaian, dan logistik. Andhika memastikan bahwa kebutuhan operasional seluruh unit di Inspektorat terpenuhi secara efisien dan tepat waktu. Ia juga menjadi pengelola logistik kegiatan-kegiatan pengawasan dan koordinasi internal.

- **Perencana Muda II** : Memiliki fungsi serupa dengan Ibu Evi, yaitu membantu dalam merancang dan mengevaluasi kegiatan kelembagaan, menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Inspektorat, serta memfasilitasi perumusan kebijakan strategis untuk efektivitas pengawasan internal pemerintahan.
- **Jabatan Fungsional Auditor** : Jabatan ini di bagi menjadi 7 Tim dan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Auditor memiliki tanggung jawab teknis dalam melaksanakan audit kinerja, audit keuangan, dan audit kepatuhan. Mereka bekerja di bawah koordinasi masing-masing IRBAN, dan hasil kerja mereka menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola perangkat daerah.

Struktur divisi Sekretariat1

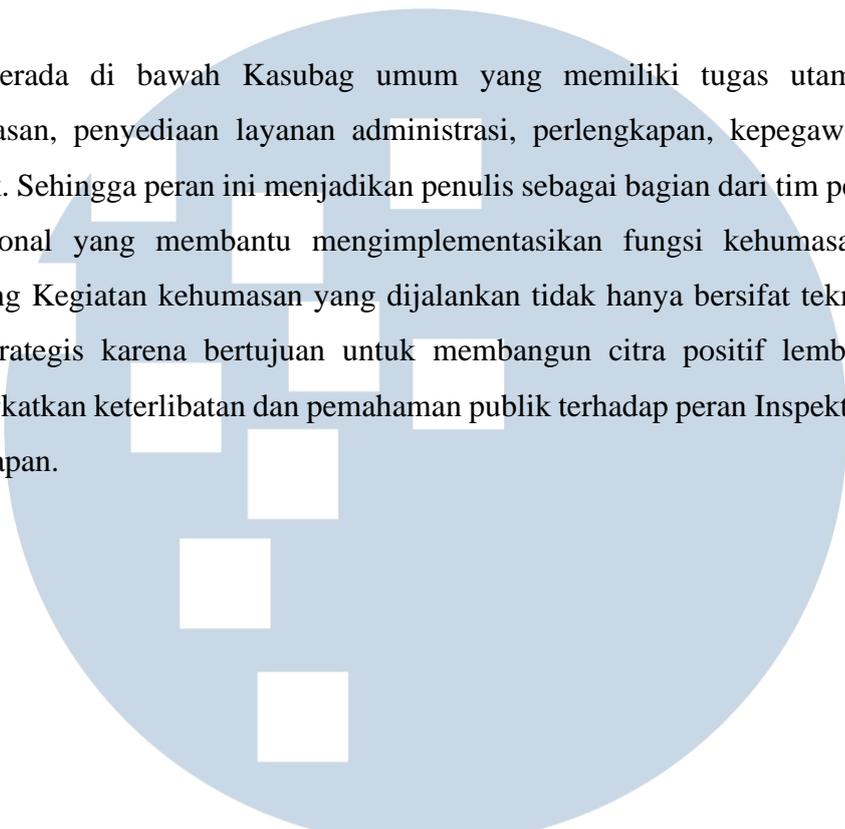


Gambar 2. 3 Struktur Divisi Sekretariat

Sumber: Dokumen Pemerintahan (2025)

Dalam struktur divisi sekretariat Inspektorat kota Balikpapan ini, penulis di tempatkan dalam posisi Hubungan Masyarakat (humas) magang di mana posisi

saya berada di bawah Kasubag umum yang memiliki tugas utama dalam kehumasan, penyediaan layanan administrasi, perlengkapan, kepegawaian, dan logistik. Sehingga peran ini menjadikan penulis sebagai bagian dari tim pendukung operasional yang membantu mengimplementasikan fungsi kehumasan secara langsung. Kegiatan kehumasan yang dijalankan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis karena bertujuan untuk membangun citra positif lembaga serta meningkatkan keterlibatan dan pemahaman publik terhadap peran Inspektorat Kota Balikpapan.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA